BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada KPP Pratama Bandung Tegallega mengenai Prosedur Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Oleh *Account Representative*, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh *Account Representative* di KPP Prtama Bandung Tegallega mengacu pada *standart operate procedure* (SOP) yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Hambatan Atau Permasalahan Yang Dihadapi *Account Representative* Dalam Mengawasi Pembayaran Masa PPN yaitu Jam kerja bank yang relatif singkat, keterbatasan MPN dan SIDJP dalam memunculkan daftar wajib pajak yang belum atau terlambat membayar atau menyetor pajak, jumlah *account representative* yang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya dan banyaknya wajib pajak yang semestinya wajib menyampaikan SPT Masa PPN dengan e-SPT, namun ingin menyampaikan dengan cara manual.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan guna meningkatkann kinerja instansi. Adapun saran yang ingin Penulis sampaikan diantaranya:

1. Untuk mengatasi keterlambatan setor yang diakibatkan jam tutup bank persepsi lebih awal daripada jam kerja kantor pada umumnya, pihak Direktorat Jendral Pajak dapat berusaha meningkatkan kerjasama dengan pihak bank persepsi untuk lebih memperpanjang jam kerja bank persepsi khusus untuk tanggal -tanggal batas penyetoran pajak.
2. Dua aplikasi utama pendukung kegiatan pengawasan kepatuhan penyetoran pajak, yakni MPN dan monitoring SPT pada SIDJP, dapat lebih ditingkatkan fiturnya. Kelemahan saat ini ialah masih belum bisa memunculkan nama-nama wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang terlambat atau belum membayar PPN-nya. Diharapkan kedepannya secara sistem dapat dimunculkan nama-nama wajib pajak yang wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang terlambat atau belum membayar dan/atau melaporkan PPN –nya atau pajak lainnya.
3. Sering terjadinya banyaknya wajib pajak yang semestinya wajib menyampaikan SPT Masa PPN dengan e-SPT, namun ingin menyampaikan dengan cara manual pengetahuan WP menyampaikan SPT masa dengan e-SPT, untuk itu diperlukan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh *account representative* terhadap tata cara penyampaian SPT masa dengan e-SPT.